

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT**

BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710 Telp. (021) 3521974 Fax. (021) 3521985

NOTA DINAS

NOMOR : AK.03.02/150-1/SET.M.EKON.01/07/2025

Kepada Yth : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Dari : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Hal : Pemohonan Penandatanganan Laporan Kinerja TW I dan II tahun 2025
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Tanggal : 7 Juli 2025

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga agar dapat menyusun dan menetapkan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kinerja yang telah dicapai, berkenaan dengan hal tersebut dengan hormat kami laporkan hal-hal berikut:

1. Permen PAN-RB No. 88 Tahun 2021 mengamanahkan kepada setiap unit kerja untuk dapat menyusun Laporan Kinerja triwulanan dan pimpinan unit kerja dapat terlibat langsung pada penyusunan laporan tersebut dalam bentuk pengesahan dokumen laporan kinerja
2. Sehubungan dengan poin 1, unit kerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama telah mengkoordinasikan dan penyusunan laporan kinerja triwulan I dan II sebagaimana terlampir didalamnya terdapat informasi tentang capaian hasil pengukuran kinerja, pelaksanaan rencana aksi, capaian program, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kendala serta upaya perbaikan pencapaian target
3. Apabila Bapak berkenan dan tidak berpendapat lain atas laporan kinerja triwulan I dan II yang telah disusun, kami mohon untuk dapat mengesahkan dokumen tersebut

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama 



Evita Manthovani
NIP. 197106061992012001

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
Sasaran Program 1. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing					
1.1	Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	84,01	84,01**	100%**
1.2	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	6,76	6,76**	100%**
Sasaran Program 2. Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas					
2.1	Tingkat Input Maturitas Sirkular	Persentase	9,2%	9,2%**	100%**
2.2	Pengeluaran Perkapita Laki – Laki dan Perempuan	Nilai	Laki-laki 16.891; Perempuan 9.920	Laki-laki **16.891; Perempuan ** 9.920	100%**
Sasaran Program 3. Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efektif					
3.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Dimanfaatkan	Persentase	100%	50%	100%
Sasaran Program 4. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Sesuai dengan Standar Nasional					
4.1	Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase	100%	50%	100%
Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas					
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	Indeks	3 dari 4	3.53	117,66%
Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik					
6.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat	Persentase	85%	50%	100%

Keterangan :

* Masih bersifat prediksi serta target dipecah ke triwulanan dan menjadi dasar perhitungan capaian kinerja

** Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta *activity* yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan

Kinerja Sekretariat Kementerian sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Program 1: Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing

Pencapaian Sasaran Program 1 : Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Nilai Reformasi Birokrasi General
2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Nilai Reformasi Birokrasi General

Latar Belakang

Kemenko Perekonomian mengukur tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi melalui 2 indikator, yaitu : Nilai RB General dan Nilai RB Tematik. Reformasi Birokrasi (RB) General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan isu-isu struktural (hulu) yang mencakup penguatan tata kelola organisasi, efektivitas atas proses bisnis, sistem kerja, dan peningkatan layanan publik. Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi General ini berpedoman pada Permen PAN-RB No. 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Nilai RB General dihitung berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB terhadap capaian pelaksanaan pada indikator Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan. Setiap indikator memiliki bobot dan kriteria penilaian tertentu. Indikator RB General Kemenko Perekonomian terdiri dari 28 Indikator :

1. Rencana Aksi Pembangunan RB General
2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General
3. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
4. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
5. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
6. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
7. Nilai SAKIP
8. Indeks Perencanaan Pembangunan
9. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE
10. Tingkat Digitalisasi Arsip
11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
12. Indeks Pengelolaan Aset
13. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
14. Indeks Kualitas Kebijakan Publik
15. Indeks Reformasi Hukum (IRH)
16. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor
17. Indeks Tata Kelola Pengadaan
18. Indeks Sistem Merit
19. Indeks Pelayanan Publik
20. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
21. Indeks SPBE
22. Capaian Prioritas Nasional
23. Capaian Indikator Kinerja Utama

24. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
25. Tindakan/Rekomendasi
26. Indeks BerAKHLAK
27. Survei Penilaian Integritas
28. Survey Kepuasan Masyarakat.

Komponen yang dinilai pada RB General sebagai berikut :

No.	Komponen Penilaian	Bobot
A	Komponen Pengungkit	
	I. Pemenuhan	20,00
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00
	III. Reform	30,00
	Total Komponen Pengungkit	60,00
B	Komponen Hasil	
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00
4.	Kinerja Organisasi	10,00
	Total Komponen Hasil	40,00
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00

Tujuan dari IKU ini untuk dapat menggambarkan pelaksanaan atas RB General di lingkungan Kemenko Perekonomian dijalankan secara konsisten, terukur dan ber kelanjutan sehingga menjadi alat ukur keberhasilan terhadap tata kelola organisasi

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2025, Nilai Reformasi Birokrasi yang terealisasi sebesar 84,01. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan hingga TW II 2025, dengan ringkasan :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan II	%Kinerja
IKU 1.1 Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	84,01**	84,01**	100%**

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan. Nilai RB General dikeluarkan di akhir tahun oleh Kemenpan.

Hingga triwulan ini, Kemenko Perekonomian belum melaksanakan pengesahan rencana aksi RB General dan Tematik ke dalam Persesmenko Tahun 2025. Hal ini disebabkan karena belum ditetapkannya Grand Design RB Nasional dan Road Map RB Nasional oleh Kemenpan RB, sehingga terjadi kekosongan arah kebijakan di tahun 2025 sebagai dampak dari perubahan RPJMN yang baru. Dalam hal ini Kemenpan RB baru menerbitkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 06/2025 pada tanggal 31 Juli 2025 yang menjadi dasar dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi pada masa transisi ini.

Namun, Kemenko perekonomian telah menyusun draft rencana aksi RB General yang nanti akan dilegalisasi bersama RB Tematik ke dalam Persesmenko 2025. Hingga TW II 2025 rekomendasi perbaikan atas Kemenpan RB terkait rencana aksi 2024 menjadi arah perbaikan yang akan dilaksanakan pada renaksi tahun 2025. Update dari kegiatan hingga TW II yang telah dilaksanakan yaitu :

1. **Rencana Aksi Pembangunan RB General :**
 - a. Permenko masih dalam proses penyusunan, akan dilaksanakan *kick off meeting*
 - b. Penetapan RB Tematik masih dalam tahap koordinasi sehingga saat ini baru disusun RB General.
 - c. Target penyelesaian dihitung secara kumulatif, bukan per triwulan
2. **Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi**
Pokja Reformasi Birokrasi melakukan pendampingan. RB memiliki PIC untuk masing-masing Indeks RB.
3. **Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi**
Rencana aksi tidak hanya penyusunan laporan, melainkan harus ada proses yang berbentuk kegiatan secara konkret.
4. **Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai :** Tidak ada catatan
5. **Tingkat Maturitas SPIP**
Kertas kerja dikumpulkan oleh MKKS kemudian diolah oleh Inspektorat. Produk akhir bukan penilaian mandiri, namun penjaminan kualitas, kemudian disetor ke BPKP. Bukti dukung dikumpulkan MKKS :
 - a. Rekomendasi :
"Pengisian Kertas Kerja" dihapus menjadi langsung "Penilaian Mandiri".
 - b. Menghapus penyusunan matriks dan langsung menjadi "pemantauan tindak lanjut".
 - c. Peraturan dideskripsikan lebih jelas menjadi "Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait Penanganan Konflik Kepentingan".
 - d. Peraturan dideskripsikan lebih jelas menjadi "Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait Pengendalian Gratifikasi".
 - e. Evaluasi SPIP dilakukan oleh BPKP yang melakukannya di Kemenko. Inspektorat terlibat dalam mengumpulkan data dan mengkonfirmasi ke unit. Output IKU justru adalah evaluasi dari BPKP
6. **Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (ZI)**
Penilaian dari inspektorat dijelaskan sebagai "Penilaian Pembangunan ZI Unit Kerja oleh Tim Penilai Internal".
7. **Nilai SAKIP**
 - a. Konfirmasi revidi diartikan memang sebagai revidi atau pemantauan. Revidi membandingkan kondisi sesungguhnya dengan kondisi ideal.
 - b. Indikator *screenshot ekonomi* kurang menggambarkan sehingga bisa diganti laporan revidi.
 - c. Rencana aksi direkomendasikan menjadi "Pendampingan pelaksanaan evaluasi SAKIP tingkat eselon I" dan dikoordinasikan oleh inspektorat. Sehingga perlu dikonfirmasi pelaksanaan kegiatan adalah MKKS atau inspektorat
 - d. Pelaksanaan evaluasi internal diingatkan menjadi "Fasilitasi pelaksanaan evaluasi internal SAKIP".
 - e. Output *coaching clinic* bisa berupa laporan *coaching clinic*
 - f. "Persiapan ..." bisa menjadi "Asistensi Penyusunan PK 2026".
 - g. Draft PK menjadi Laporan Penyusunan Asistensi PK.
8. **Indeks Perencanaan Pembangunan**
 - a. Indikator output "Matriks" harus diperjelas menjadi matrik yang dimaksud.
 - b. Kata kerja aktif menjadi kata benda. Seperti "merumuskan" dan "menyusun" bisa diganti menjadi "perumusan" dan "penyusunan".

- c. Indikator usulan revisi renja menjadi "dokumen pengusulan revisi renja".
 - d. Apakah rewiu RKKL sudah menjadi satu kesatuan dari salah satu renaksi di sini?
 - e. "Meneliti" diganti menjadi "Penelitian" atau "Pengkajian". Perlu dikonfirmasi apakah redaksinya memang penelitian.
 - f. Konfirmasi penyesuaian rancangan renja dan RKA KL berdasarkan TOR dan RAB.
 - g. "Menyesuaikan" diganti menjadi kegiatan "Penyusunan". Kegiatan penyesuaian sudah ada di renaksi setelahnya.
 - h. "Menyusun dan mengusulkan penetapan renstra" bisa langsung menjadi "penetapan renstra".
 - i. "Menyesuaikan rancangan renja" menjadi "Penetapan Renja".
 - j. Usulan renaksi Penyesuaian RKA KL berdasarkan renja Kemenko Perekonomian dan pagu anggaran.
 - k. Penyesuaian RKA KL berdasarkan pagu alokasi anggaran.
9. **Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE**
Belum cukup, tidak menjelaskan proses SPBE. Mungkin bisa berangkat dari komponen yang dibangun.
10. **Tingkat Digitalisasi Arsip**
- a. Indikator "terlaksananya" menjadi laporan dan sejenisnya.
 - b. Mengoptimalkan implementasi menjadi monev Srikandi yang outputnya pemberkasan arsip dan keaktifan user.
 - c. Mengelola dibakukan menjadi pengelolaan.
 - d. Output Khasanah perlu dikonfirmasi maksud dan definisi.
 - e. Indikator output di renaksi JIKN banyak yang masih menunjukkan bahasa renaksi, jadi bisa ditarik menjadi renaksi. Namun kemudian harus diperjelas lagi outputnya yang dimaksud.
11. **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran**
- a. Membuat nota dinas bisa langsung "Penyampaian Realisasi Anggaran". Indikator laporan realisasi anggaran.
 - b. Melakukan pengisian menjadi Monitoring realisasi capaian output pada aplikasi SAKTI.
12. **Indeks Pengelolaan Aset**
- a. Pada kolom indikator, kata "penyampaian" dihapus, menjadi langsung kata "Laporan"
 - b. Indikator "Jika Ada" perlu dikonfirmasi. Perlu dipastikan temuan ini
13. **Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)**
Indikator dokumentasi bisa diganti dengan laporan sosialisasi atau menjadi Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi.
14. **Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)**
Perlu dikonfirmasi *Feedback* yang dimaksud.
15. **Indeks Reformasi Hukum (IRH)**
Rencana aksi dipecah menjadi "Penilaian mandiri untuk tim kerja" dan "Pelaksanaan panel oleh asesor".
16. **Indeks Pembangunan Statistik**
Kata kerja seperti "melakukan" dan "melaksanakan rapat" dihapus saja.
17. **Indeks Tata Kelola Pengadaan**
- a. Konfirmasi mempertahankan stabilitas pencapaian nilai, bukti konkrit yang dimaksud. Mungkin tidak perlu dicantumkan sebagai rencana aksi.

- b. Kata kerja “meningkatkan” bisa diganti kata benda seperti “Peningkatan”.
- c. “Peningkatan pemanfaatan SIRUP” diusulkan menjadi “Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan SIRUP”. Indikator menjadi Laporan Monev.
- d. Perlu dikonfirmasi untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi KemenPANRB.

18. Indeks Sistem Merit

Diksi renaksi seperti “melaksanakan” bisa diganti “Pelaksanaan”.

19. Indeks Pelayanan Publik

Perlu didetailkan rencana aksinya, karena tidak cukup menggambarkan proses bisnis dan area apa yang ingin diwujudkan.

20. Indeks SPBE

Renaksi perlu dikonfirmasi untuk dirinci per indikator penilaian.

21. Capaian Prioritas Nasional

Tidak ada catatan.

22. Capaian IKU

- a. Perlu diperjelas redaksi rencana aksinya. Indikator output sudah sesuai.
- b. Undangan diganti laporan.
- c. Rencana aksi diusulkan menjadi “Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Rencana Aksi Triwulanan”. Indikatornya adalah laporan kinerja triwulanan
- d. Evaluasi dan pemetaan mungkin dikeluarkan saja.

23. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Tidak ada catatan.

24. Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Tidak ada catatan

25. Survei Penilaian Integritas (SPI)

Tidak ada catatan.

26. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Rekomendasi aksi yaitu publikasi pelaksanaan penyelenggaraan layanan publik dengan output dokumentasi pelaksanaan publikasi.

27. Indeks BerAKHLAK

Tidak ada catatan

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 1.1 Nilai Reformasi Birokrasi General			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Finalisasi Rencana Aksi RB General yang di	Tertunda	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu hasil evaluasi Rb sudah dilakukan dan sudah melampirkan bukti dukung

	Legalisasi ke dalam Persesmenko Ta 2025		<ul style="list-style-type: none"> • Draft renaksi RB General sudah disusun yang didukung dengan sejumlah kegiatan rapat • Namun, Persesmenko ttg RB General masih dalam proses karena akan disahkan bersama dgn Renaksi RB Tematik.
2.	Sosialisasi Finalisasi Rencana Aksi Kepada Seluruh Unit Kerja	Tertunda	Sosialisasi finalisasi Renaksi tertunda dilaksanakan, karena Persesmenko tentang RB General akan ditetapkan bersama dengan RB Tematik, yg sampai saat ini masih proses penyusunan
3.	Monitoring Evaluasi Implementasi Renaksi TW I	Tertunda	Monev Renaksi TW I tertunda dilaksanakan karena renaksi belum ditetapkan. Akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya
4.	Pengumpulan Dokumen Pendukung Implementasi RB General TW I	Tertunda	<p>Pengumpulan bukti dukung RB general TW I tertunda dilaksanakan karena renaksi belum ditetapkan</p> <p>Dokumen pendukung RB General TW I: tertunda dilaksanakan karena renaksi belum ditetapkan</p>
5.	Penyampaian Umpan Balik kepada Unit Kerja Didalam Platform yang Digunakan dalam Melaksanakan RB General	Tertunda	Feedback ke unit kerja via Platform yg digunakan: dapat dilakukan melalui LHEI, namun tertunda dilaksanakan karena renaksi belum ditetapkan. Akan dilaksanakan pada twiwulan selanjutnya
6	Optimalisasi Aplikasi Kinerja (E-Kinerja, E-SAKIP)	Terlaksana	Optimalisasi E-Kinerja, E-SAKIP: e-kinerja: Sudah dilaksanakan, bukti dukung menyusul.

Selain pelaksanaan rencana aksi diatas, Upaya lain yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan fasilitasi pelaporan capaian output
2. Melaksanakan analisis dan revidi atas usulan kebutuhan anggaran kegiatan strategis dan/atau prioritas untuk menyusun Renja 2026 Kemenko Ekon
3. Melaksanakan sinkronisasi KRISNA-SAKTI
4. Melaksanakan FGD penerapan peraturan keamanan SPBE pada sektor pemerintah pusat
5. Mengikuti dengan aktif dalam gugus tugas/tas force penyusunan peta jalan dari kecerdasan artifisial (ALKITA)
6. Sosialisasi penilaian indeks kualitas kebijakan tahun 2025
7. Melaksanakan pendataan untuk jabatan fungsional analisis kebijakan yang tertuang dalam Kepmenko Perekonomian No. 421 tahun 2024
8. Menetapkan kebijakan Kredit Usaha Rakyat, Neraca Komoditas, Devisa Hasil Ekspor, dan Kawasan Ekonomi Khusus yang menjadi objek pengukuran kualitas kebijakan
9. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Kemenko Perekonomian terkait penyusunan laporan kinerja TW II, kemudian merevisi kembali laporan kinerja TW I yang telah disusun dan melaksanakan dialog perbaikan atas analisis laporan kinerja TW I yang lalu
10. Pengadaan langsung sebanyak 394 paket dengan total realisasi (hasil negosiasi) sebesar Rp.7.706.940.742,-; pengadaan melalui mekanisme tender/seleksi sebanyak 3 paket pengadaan dengan total realisasi (hasil negosiasi) sebesar Rp. 6.993.821.357; Pengadaan melalui E-Purchasing sebanyak 13 paket dengan total realisasi (hasil negosiasi) sebesar Rp. 2.936.049.896; Pengadaan dengan mekanisme penunjukan langsung sebanyak 16 paket dengan total realisasi (hasil negosiasi) sebesar Rp.9.800.976.244,-
11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen ASN TW I, pengangkatan CASN (CPNS) Kemenko Perekonomian, pengadaan ASN (PPPK) Kemenko Bidang Perekonomian.
12. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas transaksi BMN yang muncul, serta mitigasi resiko
13. Layanan perbendaharaan dan penyelesaian tagihan pertanggungjawaban anggaran
14. Telah melaksanakan revidi atas penyusunan rencana aksi terhadap setiap indeks RB General
15. Telah dilakukan pendampingan atas pelaksanaan indeks RB General
16. Melaksanakan pemetaan program kerja Kementerian dengan 6 Tema Rb Tematik

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya berupa penghematan anggaran melalui optimalisasi ruang rapat sebagai sarana pendukung koordinasi

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Keterbatasan ruang penyimpanan arsip inaktif.
- Adanya perubahan pengelola arsip akibat mutasi dan perpindahan pegawai menimbulkan kebutuhan untuk menyamakan persepsi sejak awal terkait pengelolaan arsip.

- Instrumen kearsipan masih dalam tahap pembahasan serta penyusunan legal draft.
- Ketidaksesuaian pengisian RPD yang dilakukan oleh unit kerja dengan MKKS menyebabkan rendahnya nilai Deviasi Hal III DIPA
- Website SDM belum selesai diperbaiki sehingga menyebabkan tidak dapatnya melakukan pelayanan kepegawaian dan penyampaian informasi melalui website
- Masih rendahnya peran aktif dari pegawai dan minimnya SDM pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Belum ditetapkannya kebijakan pelaksanaan RB 2025 oleh Kemenpan RB, sehingga menjadi penghambat dalam melaksanakan monev
- Belum terpenuhinya SK CPNS jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang berasal dari perpindahan jabatan
- Kurangnya analisis yang mendalam terhadap capaian, sehingga laporan cenderung deskriptif tanpa evaluasi kritis dan kurangnya ketepatan waktu dalam pengumpulan laporan kinerja 15 hari yang telah ditetapkan
- Perubahan SOTK unit kerja dan pegawai merubah tugas dan fungsi serta kewenangan
- RPerpres penyusunan Renja dan Renstra K/L belum bisa ditetapkan hingga akhir Juni 2025. Kemudian, Pagu Indikator TA 2026 yang disampaikan oleh Kemenkeu dan Bappenas hanya mencakup biaya operasional saja, hal ini berdampak pada terlambatnya finalisasi Rancangan Renja Kemenko Ekon 2026

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Mempercepat proses pemusnahan dan penyerahan untuk memberikan ruang simpan arsip inaktif yang baru diolah
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Biro MKKS dan Unit kerja terkait pengisian RPD
- Koordinasi lebih lanjut dengan DSI untuk segera melaksanakan perbaikan
- Mengadakan sosialisasi proses bisnis pengadaan dengan menggerakkan unit kerja dan mendalami hak kewajiban pada unit kerja
- Perlunya ketepatan dan kecepatan dalam penyusunan arahan pelaksanaan kebijakan RB 2025 dengan peningkatan komunikasi dan pendampingan secara aktif dengan KemenPAN-RB
- Melaksanakan koordinasi dan penataaan bukti dukung sesuai dengan komponen indikator penilaian dengan melibatkan tim kerja dan tim asesor
- Melaksanakan koordinasi menyeluruh dan terukur dengan unit – unit kerja dalam menyusun kedalaman dan ketepatan waktu kerja
- Pemantauan kinerja secara rutin sehingga pemantauan dan evaluasi kinerja tepat waktu, tepat sasaran dan berjalan optimal
- Melaksanakan kegiatan penyelarasan program, penyelenggaraan forum, menghitung kebutuhan anggaran, melaksanakan koordinasi secara intensif bersama unit kerja dan melaksanakan koordinasi penyusunan arah dari kebijakan

Reformasi Birokrasi Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola di sektor – sektor prioritas sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan RB pada periode transisi tahun 2025. Tema RB Tematik pada periode 2025 – 2029 meliputi :

1. RB Pengentasan Kemiskinan
Tema RB ini diarahkan pada perbaikan tata Kelola dengan berfokus pada kolaborasi lintas instansi dalam penyelesaian akar masalah pengelolaan program kemiskinan, agar pemanfaatan anggaran kemiskinan dapat memberikan dampak yang optimal dalam menurunkan angka kemiskinan.
2. RB Peningkatan Investasi
Tema RB ini diarahkan untuk memperbaiki tata kelola sebagai dukungan terhadap kemudahan investasi. Upaya yang dilakukan mencakup penyederhanaan proses bisnis dan regulasi, percepatan proses perizinan, peningkatan koordinasi antar instansi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan public untuk mendorong peningkatan realisasi investasi
3. RB Mendorong Hilirisasi
Tema RB ini diarahkan pada penguatan tata kelola dan kolaborasi antar-lembaga dan daerah dalam mendukung transformasi ekonomi dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dari produk dalam negeri.
4. RB Mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan
Tema RB ini diarahkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan percepatan peningkatan akses dan mutu layanan Kesehatan baik primer maupun lanjutan. Sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang merata, aman, dan bermutu kepada setiap Masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
5. RB Mendukung Ketahanan Pangan
Tema RB ini diarahkan untuk mendukung prioritas actual Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan dan mengurangi tingkat kerawanan pangan di daerah. Birokrasi diarahkan untuk melaksanakan tata kelola dalam Upaya mewujudkan transformasi pengelolaan pertanian dari tradisional menjadi pertanian modern dengan mendorong peningkatan produksi pangan
6. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan
Pada tema RB ini diarahkan untuk melaksanakan tata kelola dalam mewujudkan transformasi Pendidikan yang berkualitas dan bermutu

Penilaian Rencana Aksi tematik dilakukan atas :

- Rencana tindak lanjut dan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi untuk tema RB Pengentasan Kemiskinan dan RB Peningkatan Investasi; sedangkan
- 3 tema RB Tematik lainnya (RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting, RB Pengendalian Inflasi, dan RB Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) menggunakan nilai tahun sebelumnya.
- **Khusus untuk 4 (empat) tema RB Tematik baru** (RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendorong Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, RB Mendorong Ketahanan Pangan, serta RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan), TPN akan melakukan reviu terhadap

Rencana Aksi dan laporan monitoring dan evaluasi yang disusun oleh instansi pemerintah, dengan catatan :

- Reviu tersebut bertujuan untuk memberikan saran dan masukan dalam rangka peningkatan kualitas Rencana Aksi di tahun berikutnya.
- Hasil reviu atas 4 (empat) tema RB Tematik baru tidak mempengaruhi penilaian Indeks RB Tahun 2025.

Tujuan dari indikator kinerja utama ini, untuk menggambarkan tingkat keterlibatan Kemenko Perekonomian dalam penyelesaian isu-isu strategis nasional yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU ini pada tahun 2025 bernilai 6,67 poin. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada target peningkatan tahun sebelumnya. Hingga Triwulan II tahun 2025, nilai Reformasi Birokrasi Tematik belum dapat ditentukan karena penilaian dilaksanakan pada akhir tahun oleh Kemenpan RB. Penilaian berdasarkan aktifitas yang telah dilaksanakan dapat diringkaskan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan II	%Kinerja
IKU 1.2 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	6,67**	6,67**	100%**

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan. Nilai RB Tematik dikeluarkan di akhir tahun oleh Kemenpan.

Pemetaan Tema RB Tematik dengan Program Kerja dari Kedeputan. Kerja keras RB Tematik lebih besar. Ada peluang untuk meningkatkan nilai RB Kemenko Perekonomian. Akan fokus ke pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi. Kedeputan hanya akan elaborai program kerja yang sudah dipetakan bersama pada rapat hari ini. Pada tahun 2025 KemenPANRB hanya berfokus pada 2 tema, yaitu pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi. Sedangkan 4 tema lainnya berupa reviu untuk kemudian akan digunakan di tahun 2026

Hingga triwulan ini, Kemenko Perekonomian belum melaksanakan pengesahan rencana aksi RB General dan Tematik ke dalam Persesmenko Tahun 2025. Hal ini disebabkan karena belum ditetapkannya Grand Design RB Nasional dan Road Map RB Nasional oleh Kemenpan RB, sehingga terjadi kekosongan arah kebijakan di tahun 2025 sebagai dampak dari perubahan RPJMN yang baru. Dalam hal ini Kemenpan RB baru menerbitkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 06/2025 pada tanggal 31 Juli 2025 yang menjadi dasar dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi pada masa transisi ini.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, menjadi dasar bagi Kemenko Perekonomian dalam menyusun rencana aksi RB Tematik 2025. Sehingga dilaksanakan kegiatan rapat bersama pemetaan program kerja atas Tema Reformasi Birokrasi Tematik dan penyusunan Rencana Aksi RB Tematik Kemenko Perekonomian. Biro Hukum dan Organisasi dan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama telah menyusun dan menyesuaikan pemetaan program kerja berdasarkan program kerja prioritas di Kemenko Bidang Perekonomian yang berdampak langsung bagi kesejahteraan

Hingga triwulan II, ini telah dilaksanakan rapat pembahasan matriks penyusunan rencana aksi RB Tematik dengan Sesdep :

1. Pemetaan Deputi I (satu) berfokus kepada pengelolaan dan pengembangan BUMN. Terkait tema RB Tematik, banyak berkaitan dengan tema pengentasan kemiskinan, peningkatan hilirisasi, dan mendorong hilirisasi. Beberapa di antaranya seperti pada proker terkait KUR Alsintan, optimalisasi penyaluran KUR kepada rakyat, optimalisasi peran BUMN Logistik dalam konektivitas nasional, dan percepatan Pembangunan SGAR
2. Pemetaan Deputi II program kerja unggulan berupa kemudahan perizinan berusaha dan berkaitan dengan investasi. Program kerja berupa pembentukan satgas, kerja sama, dan penyelesaian EU CEPA
3. Pemetaan Deputi III dapat dipetakan terkait tema layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Akan coba ditelaat terlebih dahulu mengenai bentuk dukungan pada setiap tema dalam program kerja
4. Pemetaan Deputi IV akan terkait dengan biofuel yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan hilirisasi. Ada beberapa program kerja yang tidak berkaitan dengan tema RB Tematik sehingga tidak perlu dikaitkan
5. Deputi V terkait semi konduktor akan berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, peningkatajn investasi, dan hilirisasi. Sektor pariwisata juga mendorong pengentasan kemiskinan, dan berupa mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Terkait JKK Industri Padat Karya maish terkait dengan layanan Kesehatan
6. Terkait Staf Ahli terdapat keterkaitan dengan tema RB Tematik. Pada proker *Sustainable Landscape Management Multi Donor Trust Fund*, berkaitan dengan tema kemiskinan, investasi, hilirisasi, dan ketahanan pangan. Lalu terkait proker kelapa sawit berkelanjutan berkaitan dengan tema kemiskinan, investasi, hilirisasi, dan ketahanan pangan . Selanjutnya proker BPDP berkaitan dengfan tema kemiskinan, investasi, hilirisasi, dan ketahanan pangan. Terakir pada proker kemiskinan ekstrim, berkaitan dengan pengentasan kemiskinan
7. Diperlukan juga kolaborasi dengan KEK, terutama terkait tema kesehatan dan pendidikan. Karena program di KEK sudah terdapat kedua pembahasan tersebut.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 1.2 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Finalisasi Renaksi Reformasi Birokrasi Tematik	Tertunda	Masih dalam proses finalisasi karena masih terdapat Deputi yang belum mengirimkan matriks renaksinya. Pada

			triwulan berikutnya direncanakan rapat bersama dengan KemenpanRB sebagai Guidance finalisasi
2.	Monitoring Evaluasi Implementasi Rencana Aksi TW I	Tertunda	Pelaksanaan monitoring evaluasi Renaksi RB Tematik dilaksanakan pada TW berikutnya
3.	Pengumpulan Dokumen Pendukung Implementasi Renaksi RB Tematik TW I	Tertunda	Akan dilaksanakan setelah pengesahan finalisasi renaksi RB Tematik selesai dilaksanakan
4	Penyampaian Umpan Balik kepada Unit Kerja didalam Platform yang Digunakan dalam melaksanakan RB Tematik	Tertunda	Penyampaian umpan balik kepada unit kerja masih sebatas pada pengisian pemetaan rencana aksi TB Tematik

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya berupa penghematan anggaran melalui optimalisasi ruang rapat sebagai sarana pendukung agenda RB. Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Dalam penyusunan renaksi RB Tematik tahun 2025, Kementerian/Lembaga menyesuaikan dengan enam tema RB Tematik dan turunannya yang telah dipublikasikan oleh KemenPANRB. Dalam Menyusun rencana aksi RB Tematik, perlu dilakukan diskusi antara Biro HO dan Kedeputan sebagai pelaksana program kerja
- RB Tematik perlu menyesuaikan indikator kinerja dan targetnya agar sejalan dengan indikator Stranas PK, sehingga tidak ada tumpang tindih atau gap capaian. Karena Stranas PK melibatkan banyak pihak (K/L, pemda, BUMN), Renaksi RB Tematik harus mencerminkan keterlibatan lintas sektor yang difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian
- Akan dilakukan pendampingan oleh Pokja Reformasi Birokrasi dalam penyusunan Renaksi RB Tematik bersama dengan Kedeputan pada minggu ketiga Agustus, tanggal 19-22 Agustus 2025.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Menetapkan jadwal rapat koordinasi rutin dan mekanisme *review* agar persepsi dan penjabaran program kerja konsisten sejak tahap awal
- Menyusun matriks kesesuaian indikator (RB Tematik ↔ Stranas PK) yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan target kinerja
- Menyusun agenda pendampingan secara rinci, termasuk sesi *coaching clinic* dan *review* dokumen renaksi per Kedeputusan

2

Sasaran Program 2 : Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 2 : Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Input Material Sirkular
2. Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan

2.1 Tingkat Input Latar Belakang

Material

Sirkular

PP Ekosistem Ekonomi Sirkular dengan indikator **Tingkat Input Material Sirkular yang diampu oleh Kemenko Perekonomian** mendukung Prioritas Nasional 2 Sasaran 06 yaitu Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau dalam RPJMN 2025-2029. Kementerian PPN/BAPPENAS telah menyusun Peta Jalan dan **Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN-ES) Indonesia 2025-2045** sebagai panduan implementasi PP ini. Dalam RAN-ES tersebut dijelaskan bahwa **Ekonomi Sirkular** merupakan model ekonomi yang menerapkan pendekatan sistemik untuk meminimalkan penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam rantai nilai. Berdasarkan RPJMN 2025 - 2029, proyek prioritas yang menjadi kawalan Kementerian Perekonomian dalam menkoordinasikan kebijakan pada sektor Material Sirkular adalah :

1. Pengembangan kebijakan, teknologi dan fasilitasi pengelolaan sampah dengan prinsip sirkular
2. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Nikel
3. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Tembaga
4. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Bauksit
5. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Timah
6. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Kimia

Ruang Lingkup Kebijakan Penerapan ekonomi sirkular di Indonesia diarahkan pada **3 (tiga) kebijakan utama**, yaitu (a) pengurangan penggunaan sumber daya, (b) perpanjangan daya guna produk dan material, dan (c) peningkatan daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi. Arah kebijakan ekonomi sirkular tersebut menjadi acuan dalam perancangan strategi transisi serta menentukan aksi dan implementasi.

Indikator Tingkat Input Material Sirkular merupakan **indikator dari kebijakan utama (1) pengurangan penggunaan sumber daya**. Indikator tersebut mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam produksi barang atau jasa. Baseline indikator ini di tahun 2024 sebesar 9%, dengan target tahun 2025 sebesar 9,2% dan tahun 2029 mencapai 10%.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan II 2025 nilai dari tingkat input material sirkualr sebesar 9,25 berdasarkan aktifitas kegiatan yang tealkh dilaksanakan selama triwulan ini. Adapun hasil penilaian kinerja dari IKU ini dapat di gambarkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi Triwulan II	%Kinerja
IKU 2.1 Tingkat Input Material Sirkular	nilai	9,2%**	9,2%**	100%

**Nilai masih bersifat prediksi berdasarkan pengukuran activity yang dilaksanakan tahunan*

Arah kebijakan ekonomi sirkular berfokus pada transisi dari model “ambil–buat–buang” (linear) menjadi “*pakai ulang–daur ulang–hemat sumber daya*” (sirkular). Dengan tujuan efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan keberlanjutan. Indonesia menerapkan ekonomi sirkular melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Sektor Prioritas (KLHK, KemenPPN/Bappenas), kebijakan pengelolaan sampah 3R serta integrasi dalam ekonomi hijau dan SDGs. Ekonomi Sirkular bukan hanya soal daur ulang, tapi tentang desain ulang sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Adapun arah kebijakan umum, yaitu:

1. Mendorong penggunaan bahan baku ramah lingkungan dan daur ulang dan Kebijakan *Extended Producer Responsibility* (EPR) untuk produsen.
2. Sinkronisasi regulasi terkait produk ramah lingkungan agar produk mudah diperbaiki, didaur ulang, atau tahan lama.
3. Penguatan industri daur ulang melalui insentif untuk investasi di sektor daur ulang dan pengolahan limbah serta dukungan pada UMKM berbasis ekonomi Sirkular.
4. Pengelolaan sumber daya secara efisien melalui Optimalisasi pemanfaatan air, energi, dan bahan mentah.
5. Transisi menuju energi bersih melalui Integrasi Ekonomi Sirkular dengan ekonomi rendah karbon.
6. Edukasi publik dan pelibatan masyarakat dalam sistem Ekonomi Sirkular.
7. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan komunitas dalam implementasi ekonomi sirkular.
8. Pemanfaatan teknologi dan data digital untuk pelacakan rantai pasok dan efisiensi produksi

Pada triwulan II 2025, implementasi rencana aksi nasional ekonomi sirkular (RAN ES) di Indonesia yaitu :

- Penguatan Kebijakan Ekonomi Sirkular di Indonesia, melalui :
 1. *Capacity building* Ekonomi Sirkular;
 2. Peluncuran Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Nasional (RAN-ES) Kemenko Perekonomian 2025-2045.
- Implementasi **Pilot Project Ekonomi Sirkular** pada sektor prioritas, non-sektoral, serta provinsi proyek percontohan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) Bappenas.
- **Komunikasi dan Penjangkauan** Kebijakan Ekonomi Sirkular melalui platform ekonomi sirkular nasional, pengembangan mekanisme dan manajemen pendanaan ekonomi sirkular, menjalin kerja sama internasional (keterlibatan Indonesia dalam platform atau aliansi ekonomi sirkular tingkat global misalnya *Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency*

dan Platform for Accelerating Circular Economy) dan pengembangan produk *public awareness*

- **Pemantauan dan evaluasi** kegiatan ekonomi sirkular melalui Sekretariat Ekonomi Sirkular Bappenas dan Pengembangan metode dan mekanisme pendukung monitoring dan evaluasi melalui AKSARA (alat M&E untuk Pembangunan Rendah Karbon).

Sebagai koordinator PP dan Pengampu Indikator Tingkat Input Material Sirkular, maka Kemenko Perekonomian perlu mencantumkan **strategi dan arah kebijakan Ekosistem Ekonomi Sirkular dalam Renstra** Kementerian 2025-2025. Strategi dan arah kebijakan tersebut dapat mengambil **dua pendekatan**, yaitu:

1. Mengambil posisi sebagai koordinator untuk melaksanakan sinkronisasi kebijakan lintas K/L berbasis Peta Jalan dan RAN-ES

Opsi pertama mutlak untuk dilaksanakan Kemenko Perekonomian sebagai koordinator PP Ekosistem Ekonomi Sirkular. Dalam hal ini, Kemenko Perekonomian dapat berperan sebagai pelaksana Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peta Jalan dan RAN-ES di Kementerian/Lembaga. Kemenko Perekonomian dapat berkolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana kerja sama yang sudah terbangun selama ini dalam Sismonev dan Emonev

2. Mengusulkan kebijakan ataupun program tambahan untuk memperkuat kegiatan Kementerian/Lembaga dalam Peta Jalan dan RAN-ES. Berikutnya untuk opsi kedua, berdasarkan *benchmarking* dengan negara ASEAN dan negara maju yang telah menerapkan ekosistem ekonomi sirkular, kami dapat mengusulkan beberapa program untuk melengkapi dan mendukung kegiatan Kementerian/Lembaga, sebagai berikut (detail dapat dilihat pada lampiran):

- Pengembangan *Industrial Symbiosis* di KI/KEK: sistem ini dapat menjaga nilai barang dalam rantai produksi dan mengurangi jumlah input material di KI/KEK. Sistem dilakukan dengan kolaborasi penggunaan input-limbah antar pelaku usaha dalam KI/KEK atau area sekitar dengan tujuan penggunaan input sekunder dan mengurangi input virgin (bahan mentah alam). Implementasinya dapat dilakukan dengan memilih pilot project di KI/KEK tertentu, seperti KEK Nongsa yang berfokus pada industri digital. Penerapan sistem dapat menjadi nilai tambah bagi calon investor industri digital yang mensyaratkan adanya ekosistem industri ramah lingkungan.
- Pengembangan Strategi *National Reverse Logistics* sebagai *enabler* utama pengembangan ekonomi sirkular, yang memungkinkan pengumpulan, pemrosesan ulang, dan reintegrasi produk atau material bekas kembali ke dalam rantai nilai industri. Adapun potensi hal-hal yang dapat dilakukan, yaitu:
 - Pengembangan model bisnis dan pelibatan BUMN Logistik dan Infrastruktur dalam: (1) pengelolaan dan operasional Reverse Logistics Nasional; dan (2) peninjauan model bisnis dan komersialisasi bidang daur ulang industri;
 - Penyusunan kebijakan nasional pengembangan Reverse Logistics Nasional dan mendorong sinergi kebijakan lintas kementerian dalam mendorong industri, UMKM, dan konsumen dalam penerapan ekonomi sirkular.

- Pengembangan Pengelolaan dan *Circular Manufacturing* Limbah Baterai Kendaraan Listrik (EV) untuk memperkuat ekosistem baterai EV yang terintegrasi dan meningkatkan ketahanan suplai *critical mineral*. Dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Proyeksi peningkatan akumulasi dan permintaan EV yang menimbulkan potensi lonjakan limbah baterai;
 - Baterai merupakan produk dengan *resource intensity* yang tinggi, terutama *critical mineral* (litium, cobalt, dan nikel) yang sifatnya tidak terbarukan;
 - Tingkat *recovery* critical mineral dari baterai EV di akhir masa pakai (*end of life*) sangat tinggi, dengan estimasi Nikel ($\pm 80\%$), Cobalt: ($\pm 90\%$), Tembaga ($\pm 80\%$), dan Litium ($\pm 70\%$) (berdasarkan publikasi *Transport Environment* dan *Rocky Mountain Institute*)

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 2.1 Tingkat Input Material Sirkular			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Melaksanakan Rapat Koordinasi Kebijakan Antar Kementerian/Lembaga	Terlaksana	Melaksanakan rapat bilateral dengan Bappenas dalam membahas (1) Peran Kemenko dalam Peta Jalan RAN-ES; (2) Perhitungan target indikator tingkat input material sirkular; dan (3) hal-hal lain yang perlu didiskusikan, dengan No. UND PR.05.01/48/SET.M.EKON.1/07/2025
2.	Pengumpulan Data Penggunaan Material Sirkular di Kementerian Teknis	Terlaksana	Melaksanakan rapat koordinasi Asia Zero Emission Community (AZEC) terkait progress proyek TPPAS Regional Legok Nagka

Upaya nyata strategi dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

1. Pengarusutamaan ekonomi sirkular dalam perencanaan nasional dan daerah dengan mengintegrasikan prinsip sirkular dalam kebijakan sektoral dan sinkronisasi kebijakan pusat daerah dalam pengelolaan material dan limbah;
2. Peningkatan pemanfaatan material sekunder melalui peningkatan tingkat input material sekunder melalui daur ulang, *upcycling*, dan substitusi bahan baku serta pengembangan sistem pasar untuk produk daur ulang dan limbah bernilai ekonomis;

3. Pengembangan infrastruktur dan teknologi sirkular dengan dukungan terhadap infrastruktur industri hijau dan pusat daur ulang terpadu dan adopsi teknologi digital dan otomasi untuk efisiensi rantai pasok;
4. Penguatan investasi dan pembiayaan hijau melalui insentif fiskal bagi pelaku usaha dan investor yang mengadopsi model bisnis sirkular dan kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk pengembangan produk keuangan hijau;
5. Peningkatan SDM dan kesadaran publik melalui pengembangan kapasitas pelaku industri, pemerintah dan masyarakat serta melalui kampanye nasional dan integrasi ekonomi sirkular dalam pendidikan dan pelatihan vokasi;
6. Peningkatan data dan sistem pemantauan dalam pelaksanaan dan penerapan ekonomi sirkular;
7. Kelima sektor tersebut merepresentasikan hampir 1/3 dari PDB Indonesia dan mempekerjakan lebih dari 43 juta orang di 2019. Selain itu, sektor-sektor tersebut termasuk penghasil limbah terbesar

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang TW II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
2. Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan TW II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Adanya perubahan SOTK dan reorganisasi unit kerja sehingga terdapat perubahan dalam tugas fungsi dan kewenangan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam pembahasan identifikasi isu/permasalahan terkait dengan Tingkat Input Material Sirkular
2. Memperkuat kolaborasi dengan unit kerja dalam mengidentifikasi program kerja yang nantinya akan berkaitan dengan Tingkat Input material Sirkular.

2.2 Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan

Latar Belakang

Salah satu indikator RPJMN 2025–2029 adalah Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP), yang diampu oleh Kemenko Bidang Perekonomian. PPLP tercantum dalam Prioritas Nasional 4, Program Prioritas ke-19, dan menjadi indikator ke-6 yang mencerminkan capaian kesejahteraan berbasis gender

Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan merupakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan jenis kelamin kepala rumah tangga (L/P) yang dihitung berdasarkan paritas daya beli dengan mempertimbangkan perbedaan harga antar daerah dan pembobotan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki maupun perempuan.

Pada tahun 2023, capaian pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp 16.736 ribu, sedangkan perempuan mencapai Rp 9.579 ribu. Sementara pada tahun 2025 tingkat pengeluaran tersebut diharapkan dapat meningkat dengan target sebesar Rp 16.891 ribu (laki-laki) dan Rp 9.920 ribu (perempuan). Selanjutnya pada tahun 2029 ditargetkan mencapai Rp 17.899 ribu (laki-laki) dan Rp 10.603 ribu (perempuan). Peningkatan pengeluaran per kapita baik laki-laki maupun perempuan diharapkan meningkat dari tahun 2025 hingga 2029

Apabila merujuk ke definisi dari indikator ini maka faktor pembeda pengeluaran berdasarkan gender tersebut adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki maupun perempuan. Di mana secara historis TPAK laki-laki lebih besar dari perempuan. Pada tahun 2023, TPAK laki-laki mencapai 84,66%, sementara perempuan hanya 56,42%. Maka peningkatan pengeluaran per kapita berdasarkan gender tentu akan mengalami peningkatan bila ekonomi (PDB) meningkat. Namun, untuk meningkatkan pengeluaran per kapita perempuan diperlukan upaya lebih karena TPAK-nya yang masih rendah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK perempuan yaitu:

1. Pendidikan, di mana jumlah perempuan yang berpendidikan tinggi lebih banyak namun tidak masuk dalam angkatan kerja;
2. Jenis pekerjaan, di mana perempuan cenderung berada di sektor informal atau paruh waktu;
3. Tingkat kesehatan yang mempengaruhi produktivitas dan pola konsumsi;
4. Akses terhadap teknologi digital yang memengaruhi peluang ekonomi dan pengeluaran;
5. Ekonomi perawatan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui *Care Economy Industry*. Sektor ini yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar yang diharapkan dapat menghasilkan *outcome* sebagai berikut:
 - a. Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
 - b. Perluasan lapangan kerja di sektor perawatan bagi perempuan dan laki-laki.

Arah Kebijakan dari IKU Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan yaitu:

- Jaminan kesetaraan partisipasi pendidikan antar gender guna memperluas peluang kerja bagi perempuan;
- Akses terhadap pembiayaan dan pelatihan usaha membatasi pilihan kerja mandiri, khususnya bagi kelompok rentan, berpendapatan rendah, dan di daerah terpencil
- Persentase perempuan berpendidikan tinggi yang secara sukarela berada di luar angkatan kerja masih tinggi;
- Beban ganda peran domestik dan terbatasnya dukungan terhadap pengaturan kerja yang ramah keluarga;
- Mendorong regulasi ketenagakerjaan yang adaptif dan ramah perempuan agar mereka tetap bertahan di angkatan kerja.
- Kebijakan ekonomi perawatan ini sangat menunjang upaya penghapusan kesenjangan gender dan mendobrak budaya patriarki melalui penguatan kapasitas perempuan, pembagian kerja perawatan yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan, dan peningkatan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2025, Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan berdasarkan penilaian mandiri dari aktivitas yang telah dilaksanakan maka dapat diringkas sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan II	%Kinerja
IKU 2.2 Pengeluaran Perkapita Laki – Laki dan Perempuan	Rupiah	Lk : 16.736 Pr : 9.579	Lk : 16.736** Pr : 9.579**	100%**

**Nilai masih bersifat prediksi berdasarkan pengukuran activity yang dilaksanakan secara mandiri pada triwulan I*

Strategi pada IKU ini dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dengan menjalankan peta jalan ekonomi perawatan berarti berinvestasi terhadap sumber daya manusia, termasuk didalamnya perempuan. Dengan demikian, ketimpangan gender akan dapat diatasi. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, utamanya poin ke empat, yaitu penguatan pemberdayaan, sumber daya manusia, sains, teknologi, olahraga, penguatan kesetaraan gender dan juga penguatan perempuan, pemuda, dan disabilitas

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024, rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita laki-laki mencapai 2,91% per tahun, sementara perempuan hanya 2,46% per tahun. Tren ini mengindikasikan adanya gap yang terus meningkat, menandakan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Hingga TW II ini, Kegiatan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang telah Kemenko Perekonomian lakukan dalam mendukung kesetaraan peran Perempuan antara lain :

1. Literasi Digital (Kemenkominfo)
Program Digital Talent Academy dan Pandu Literasi Digital menjangkau ribuan peserta, termasuk perempuan, untuk meningkatkan keterampilan digital.
2. Literasi Keuangan (OJK)
Program "Gencarkan" menjangkau 187.140 perempuan melalui 1.535 kegiatan edukasi keuangan hingga Mei 2025.
3. Pemberdayaan UMKM (Kemen UMKM)
Program LAKSMI dan Entrepreneur Hub mendukung UMKM perempuan, meskipun belum sepenuhnya spesifik untuk perempuan.
4. Care Economy (KPPPA)
Program Rumah Bersama Indonesia dan peta jalan ekonomi perawatan memperkuat partisipasi perempuan.
5. Pariwisata Halal (Kemenpar)
Pelatihan pemandu wisata dan digital marketing melibatkan 35-45% peserta perempuan.
6. Ekonomi Inklusif (Bank Indonesia)
Program Strive Indonesia menargetkan 300.000 UMKM, dengan 190.000 tercapai hingga 2025, banyak melibatkan perempuan.

Pada seluruh rapat ini menghasilkan kesepakatan, perlunya evaluasi bersama (*on-going evaluation*) untuk memastikan program-program yang dijalankan selaras dengan target. Selain itu juga terdapat tindaklanjut lainnya yang meliputi :

1. Kolaborasi antar-K/L untuk program literasi dan pemberdayaan perempuan.
2. Integrasi program seperti Rumah Bersama Indonesia dan Strive Indonesia.
3. Penyusunan strategi untuk mengatasi penurunan partisipasi kerja perempuan pasca-menikah.
4. Pemilahan data berbasis gender untuk evaluasi program yang lebih akurat.
5. Rencana aksi bersama untuk mengurangi kesenjangan pengeluaran per capita dan meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan.

Setiap kementerian/lembaga memiliki program yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, baik secara langsung (KPPPA, BI) maupun tidak langsung (Kemenparekraf, Kemendag). Kemenko Perekonomian berkomitmen mendorong sinergi lintas sektor guna memperkuat peran perempuan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, potensi sinergi lintas sektor ini diantaranya :

- Kolaborasi lintas kementerian untuk memperkuat literasi digital dan keuangan perempuan.
- Sinergi dengan stakeholder internasional (contoh: Women's World Banking, MasterCard).
- Peningkatan koordinasi untuk memastikan program mencapai target yang lebih terfokus pada perempuan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 2.2 Pengeluaran Perkapita Laki – Laki dan Perempuan			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Monitoring Pengumpulan Data Pengeluaran Perkapita oleh Kementerian Terkait	Terlaksana	<p>Status Capaian TW II :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenkominfo: 3.330 masyarakat dilatih literasi digital. • Kemenparekraf: 35-45% peserta pelatihan adalah perempuan. • OJK: 187.140 peserta dalam 1.535 kegiatan literasi keuangan. • BI: Hampir 190.000 UMKM tercapai dalam program Strive Indonesia

			<p>Tindak lanjut dari data dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi antar kementerian melalui Kemenko Perekonomian. • Menyusun rencana aksi bersama untuk mengurangi kesenjangan pengeluaran perkapita dan meningkatkan TPAK perempuan. • Mengevaluasi efektivitas program melalui indikator yang terukur.
2.	Fasilitasi <i>workshop</i> kebijakan pengeluaran gender	Terlaksana	Telah melaksanakan Fasilitasi <i>workshop</i> kebijakan pengeluaran gender.
3	Monitoring Kesesuaian Data Pengeluaran Gender	Terlaksana	Melaksanakan rapat koordinasi dengan Prospera

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

1. Menghadiri rapat pembahasan target dan rencana aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025 – 2029 yang diselenggarakan oleh Kemendukbangga/BKKBN pada 5 Juni 2025
2. Menghadiri advokasi pengintegrasian perspektif gender yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA pada 19 Juni 2025
3. Menghadiri Launching Pokja Care Ekonomi yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA pada 25 Juni 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang TW II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Memaksimalkan penggunaan fasilitas zoom meeting
2. Pengumpulan dan sharing data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan TW II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Adanya perubahan SOTK dan reorganisasi unit kerja pada Kementerian dan Lembaga terkait sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intens

dengan unit kerja yang mengampu program kerja yang berkaitan dengan pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada TW II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat kolaborasi dengan unit kerja dalam mengidentifikasi program kerja yang nantinya akan berkaitan dengan pengeluaran perkapita laki-laki dan Perempuan

3

Sasaran Program 3 : Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efisien

Pencapaian Sasaran Program 3 : Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efisien ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Dimanfaatkan

3.1 Persentase Latar Belakang

Rekomendasi

Kebijakan

Lintas

Sektoral yang

Dimanfaatkan

Indikator ini mengukur efektivitas koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang dilaksanakan melalui forum koordinasi, fasilitasi, dan sinergisitas antar Kementerian/Lembaga. Indikator Utama ini menekankan *outcome*, tingkat penerimaan dan pemanfaatan konkret dari hasil koordinasi yang telah dilaksanakan.

Adapun rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang diampu oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025 adalah :

1. Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi
Kegiatan ini mencerminkan peran dari Kemenko Ekon dalam memastikan kebijakan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara tepat waktu, terintegritas, dan berdampak. Melalui koordinasi ini diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak terjadi duplikasi kebijakan, stagnasi pelaksanaan, atau konflik kepentingan antar Kementerian/Lembaga
2. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja
Sebagai amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, Sekretariat Kemenko Ekon berperan dalam mengkoordinasikan kebijakan lintas sektoral yang mendukung penciptaan iklim usaha yang sehat, investasi yang kompetitif dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
3. Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi
Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mencerminkan keadilan dan distribusi yang merata antardaerah, antarwilayah, serta kelompok masyarakat.

Rumus Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti:

$$\% \text{ R. Kebijakan Lintas Sektor} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang terselesaikan}} \times 100$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2025, Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti telah terealisasi sebesar 50%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan yaitu pada proses penyusunan rekomendasi kebijakan lintas sektoral hingga Triwulan II 2025, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi Triwulan II	%Kinerja
IKU 3.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan	Persen	50%	50%	100%

**Hasil Realisasi dan %Kinerja berdasarkan pengukuran activity, karena nilai persentase baru bisa diketahui pada akhir tahun.*

Berdasarkan kegiatan yang menunjang langsung tercapainya tujuan target yang diharapkan, kegiatan rencana aksi pada Triwulan II 2025 telah tercapai sebesar 50%. Persentase rekomendasi kebijakan lintas sektor yang ditindaklanjuti baru dapat diketahui nilainya pada akhir tahun.

Kebijakan lintas sektor yang aktivitasnya telah dilaksanakan hingga Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Syariah

Potensi ekonomi syariah dapat dioptimalkan dengan ekosistem halal yang terintegrasi, baik dari sisi keuangan syariah, industri halal, dan keuangan sosial syariah. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2025 – 2029 menargetkan penguatan rantai nilai halal dan platform digital. Untuk itu, dibutuhkan sinergitas dan koordinasi antar sektor seperti BPJPH, Kementerian Perindustrian dan KNEKS. Terkait dengan digitalisasi, saat ini mulai berkembang platform sertifikasi halal online dan marketplace halal. Akan tetapi, masih memerlukan regulasi yang mendukung keamanan siber dan kepatuhan syariah. Kolaborasi lintas sektor dan kerja sama internasional, seperti dengan Islamic Development Bank (IsDB) diperlukan untuk membangun ekosistem halal yang kokoh.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, dalam pencapaian proses penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dengan Ekonomi Syariah, disampaikan sebagai berikut:

- Biro MKKS mengawal kolaborasi antara BPJPH dengan Kementerian Agama, dengan pemisahan umum di Kementerian Agama dan peraturan Khusus di BPJPH.
- Mengawal pembahasan rancangan Per-BPJPH tentang Tata Niaga Impor Produk Halal sebagai dasar penyusunan Surat Kesesuaian Kehalalan (SKK) yang perlu ditindaklanjuti lebih detail kembali dalam ketentuan regulasi kehalalan produk impor yang masuk ke Indonesia.
- Monitoring implementasi Roadmap Pengembangan Dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 sebagai tindak lanjut kejelasan wewenang tugas fungsi ekonomi syariah yang di-lead oleh

KNEKS dan OJK untuk diikoordinasikan isu dan program kerja dengan kementerian/lembaga terkait.

- Melakukan pemetaan awal dalam deep analysis terkait dengan industri halal
- Mengawal perumusan SKB MEKSI 2025-2029 yang akan digunakan sebagai dasar hukum kerja bersama kementerian/lembaga terkait implementasi masterplan ekonomi syariah di Indonesia.
- Memberikan tanggapan/masukan atas dokumen MEKSI 2025-2029 kepada KNEKS sebagai upaya penyempurnaan dokumen masterplan tersebut.
- Menyiapkan bahan paparan Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Sarasehan Ekonom Islam Indonesia yang bertajuk Arah Kebijakan Penguatan Ekonomi Islam di Indonesia.

2. Indonesia National Single Window (INSW)

Dalam upaya meningkatkan sinergi dan kolaborasi kementerian/lembaga dalam memberikan efisiensi layanan publik yang terintegrasi serta digitalisasi bidang ekspor impor, telah dibentuk unit kerja Indonesia National Single Window (INSW). Sesuai dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2018 tentang INSW, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Dewan Pengarah INSW memiliki tugas dalam harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga yang layanannya terhubung dalam INSW. Sebagai tindak lanjut atas Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW Semester 2 Tahun 2024, perlu dilaksanakan pembahasan progres capaian isu strategis tahun 2024 dan rencana kegiatan strategis tahun 2025

Hingga Triwulan II Tahun 2025, dalam pencapaian proses penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dengan INSW, disampaikan sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan pembahasan Unit Layanan Single Window (ULSW) Kementerian Pertanian
- Telah dilaksanakan pembahasan capaian dan evaluasi isu strategis tahun 2024 dan usulan isu strategis tahun 2025. Selain itu, juga dilakukan pembahasan terkait dengan ketentuan pasal 19 Perpres No 44 Tahun 2018.

Proyeksi triwulan II tahun 2025 tidak jauh berbeda apabila dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun 2024. Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan lintas sektor telah dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang intens sehingga diprediksi penyelesaian rekomendasi kebijakan lintas sektor dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.

3. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja

Pada Triwulan ke II telah dilaksanakan pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan pelaksanaan UUCK oleh Kemenko Perekonomian dengan diundangkannya PP No. 25/2025 tentang perubahan peraturan pemerintah No. 41/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kemudian peraturan yang lain yang telah diundangkan yaitu PP No 28 tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Kegiatan lain yang telah dilaksanakan yaitu pelaksanaan koordinasi antar K/L dalam penyusunan revisi peraturan pelaksanaan UUCK dengan menyusun revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 3.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Efisien			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Menindaklanjuti Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian pada Lintas Sektor dalam Bentuk Naskah Kedinasan dan/atau Karya Tulis Ilmiah	Terlaksana	Telah melaksanakan kegiatan tindak lanjut rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian yang meliputi kebijakan ekonomi syariah, kebijakan INSW, dan kebijakan koordinasi UUCK

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

1. Menyusun bahan paparan Arah Kebijakan Penguatan Ekonomi Islam di Indoensia yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian dalam acara Sarasehan Ekonom Islam Indonesia pada 15 April 2025.
2. Menyusun tanggapan/masukan Dokumen MEKSI 2025-2029 yang disampaikan kepada KNEKS pada 27 Mei 2025.
3. Menyusun bahan Ekonomi Syariah Indonesia untuk Bapak Wakil Presiden RI pada 29 Mei 2025.
4. Menghadiri pembahasan *Logistic Performance Dashboard* untuk indikator domestik dan internasional *Port Ship Turnaround Time at Port* pada 5 Mei 2025.
5. Menghadiri pembahasan *Logistic Performance Dashboard* untuk indikator domestik internasional (Postal) *Postal Delivery Time* pada 6 Mei 2025.
6. Menghadiri pembahasan *Logistic Performance Dashboard* untuk indikator domestik dan internasional *Aviation Container – Dwell Time Import* pada 6 Mei 2025.
7. Menghadiri pembahasan *Logistic Perfomance Dashboard* untuk indikator Domestik dan Internasional *Port Dwell Time & Ship Turnaround Time* pada 16 Mei 2025.
8. Menghadiri pembahasan rencana tindak lanjut PP Nomor 28 Tahun 2025 pada 30 Juni 2025.
9. PP No.25 tahun 2025 tentang perubahan PP No.41/2021
10. PP No. 28 tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang TW II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting
- Pengumpulan dan *Sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai

- Dilakukan kolaborasi pembiayaan dengan stakeholder terkait

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada TW selanjutnya

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Kebijakan Cipta Kerja mencakup multi sektor sehingga melibatkan antar K/L yang cukup banyak, oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi lintas K/L dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan terkait. Sehingga dibutuhkan waktu yang cukup dalam rangka pemahasan peraturan perundang-undangan agar komprehensif
- Permohonan uji materil terhadap peraturan perundang-undangan tidak ada Batasan waktu, sehingga dapat dilakukan kapan saja oleh para pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya advokasi terhadap UUCK dan Peraturan pelaksanaan akan terus dibutuhkan dalam rangka menjaga kebijakan Cipta Kerja
- Belum diimplementasikannya secara maksimal regulasi dari PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Jaminan Produk Halal.
- Adanya perubahan TUSI unit kerja di setiap kementerian/lembaga karena adanya perubahan SOTK.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan K/L terkait secara simultan
- Koordinasi dan sinergi antar K/L terkait dalam rang advokasi *Justicial Review* terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana
- Dukungan anggaran dalam rangka fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi antar K/L penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi *Justicial Review* Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana
- Memperkuat kolaborasi dengan unit kerja di tiap kementerian/lembaga terkait.
- Perlu adanya pembaharuan kelembagaan INSW karena perubahan tugas dan fungsi unit kerja di setiap kementerian/lembaga.

4

Sasaran Program 4 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan Standar Nasional

Pencapaian Sasaran Program 4 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan Standar Nasional ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

4.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Penye-

Latar Belakang

Persentase penyelesaian dokumen penyelenggaraan tata kelola pemerintah merupakan ukuran yang menggambarkan capaian atas penyelesaian dokumen penyelenggaraan tata kelola di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator

**lenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan**

Bidang Perekonomian. Penyelesaian Dokumen Tata kelola merupakan hasil dari proses bisnis sekretariat yang berfokus pada empat bidang utama yakni perencanaan, hukum dan organisasi, umum dan sumber daya manusia dan komunikasi, layanan informasi dan persidangan. Seluruh Dokumen Tata Kelola yang dihasilkan harus mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh instansi pembina. Adapun kriteria yang menunjukkan bahwa dokumen yang dihasilkan telah sesuai dengan standar apabila (1) Format dan Subtansi telah sesuai dengan acuan yang digunakan, (2) Dokumen dihasilkan tepat waktu, (3) Dokumen yang mendapatkan sedikit perbaikan dari instansi pembina.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2025, nilai Reformasi Birokrasi yang telah terealisasi sebesar 50% atau mencapai 100% dari target TW II 2025 sebesar 50% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi Triwulan II	%Kinerja
IKU 4.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah	Persen	50%	50%	100%

**Hasil Realisasi dan %Kinerja TW II berdasarkan pengukuran activity,*

Sekretariat berfungsi menyelenggarakan penyelesaian dokumen pemerintahan di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian, yang berfokus pada 4 komponen utama yakni perencanaan kinerja dan kerja sama; hukum dan organisasi; umum dan sumber daya manusia; dan komunikasi layanan informasi dan persidangan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 4.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja TW II	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen peta strategis Kemenko Bidang Perekonomian dalam kerangka ekonomi RPJMN 2025-2029, Dokumen identifikasi peran dari Kemenko Perekonomian

			<ul style="list-style-type: none"> • Matriks Indikator Kinerja (IKU) Usulan Biro MKKS, • Dokumen final matriks indikator kinerja yang telah sesuai dengan dokumen perencanaan nasional, tugas dan fungsi, serta kesesuaian tema substansi • Laporan Kinerja TW II dan Dokumen Monev Reviu Laporan Kinerja TW I • Dokumen Kinerja Anggaran SMART (TW I dan II), Revisi DIPA Efektivitas Pelaksanaan Anggaran TW IV dan Anggaran Hibah, Revisi Pemutakhiran POK TA 2025, DIPA K/L TA 2026, POK Unit Kerja TA 2026 dan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan TW II Tahun 2025 melalui eMonev • Dokumen POKJA 2025 • Penyusunan laporan dan sosialisasi layanan data dan informasi
2.	Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Hukum dan Organisasi TW II	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian • Daftar isi Produk Hukum Kemenko Perekonomian • Penyusunan rancangan peta jabatan • Permenko Perekonomian No.14/2022 tentang Peta Proses Bisnis pada Kemenko Perekonomian • Permenko Perekonomian No. 1/2025 tentang Mekanisme Kerja di Lingkungan Kemenko Perekonomian

3.	Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Administrasi umum dan SDM TW II	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Laporan Keuangan Audited TA 2024 telah disampaikan tepat waktu ke Kementerian Keuangan pada bulan Mei 2025 • Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal Tahun 2025 telah dilaksanakan dan telah memperoleh surat hasil rekonsiliasi (SHR) • Dokumen pemberkasan arsip pada aplikasi SRIKANDI • Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Semester I 2025 • Monitoring evaluasi layanan SDM • Pelayanan pengadaan, pengangkatan ASN, dan Mutasi Penugasan ASN • Layanan cuti, pensiun dan pemberhentian ASN, penggajian, tunjangan, fasilitas dan perlindungan ASN
4.	Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Komunikasi dan Informasi Publik, Persidangan dan Naskah Menteri TW II	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen PPID tentang pengelolaan pengaduan Masyarakat dan informasi public • Media massa yang dimiliki Kemenko Perekonomian, digunakan untuk menyelenggarakan edukasi public mengenai kebijakan terkait isu di Bidang Ekonomi

Selain pelaksanaan rencana aksi diatas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Melakukan rapat pra kick-off Monitoring dan Evaluasi program PN TA 2025 dalam rangka mengidentifikasi isu-isu yang dikawal oleh Kemenko Perekonomian dan mengidentifikasi Rencana Aksi Sismonev 2025
- Melakukan Kick-off Pengendalian Program Prioritas Nasional TA 2025 bersama Kantor Staf Presiden.
- Melakukan penelitian dan reviu atas usulan kebutuhan anggaran kegiatan strategis dan/atau prioritas pada Triwulan II TA. 2025

- Berkoordinasi secara bilateral bersama unit kerja eselon II yang terkait dengan kebijakan hilirasi dan investasi dengan Direktorat PEMPMP Bappenas dan Direktur Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi.
- Menginventarisasi kebutuhan penyesuaian dengan Rancangan Renstra Kemenko Perekonomian 2025-2029.
- Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang lancar dan feedback yang baik antara Sekretariat dengan unit-unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian
- Menyusun draft konsep kinerja dan mensosialisasikan kepada PIC unit kerja agar dapat meningkatkan pemahaman dalam menyusun kinerja
- Telah dilakukan penyusunan draft standar keluaran kebijakan dan Notula Rapat
- Telah dilakukan pembahasan draft/rancangan standar keluaran kebijakan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Menkelompokkan peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Pelaksanaan bantuan hukum/advokasi hukum
- Penyusunan dan penyesuaian analisis jabatan serta analisis beban kerja sesuai kebutuhan organisasi dalam bentuk Rancangan Keputusan Sesmenko tentang Informasi Jabatan (10%).
- Pelaksanaan analisis evaluasi struktur organisasi yang telah dikonsultasikan dengan KemenPANRB terkait hasil evaluasi struktur organisasi (10%).
- Penyusunan Rancangan Peta Jabatan yang memuat penyesuaian struktur organisasi
- Evaluasi jabatan serta penyusunan Rancangan Permenko Kelas Jabatan Tahun 2025 (20%)
- Pembentukan kelompok kerja sesuai jumlah unit kerja pada tingkat JPT Pratama telah dilaksanakan di seluruh unit kerja, mencakup 4 Biro di lingkungan Sekretariat, Inspektorat, serta 30 unit kerja Kedeputian
- *Benchmarking* aplikasi modeling dalam penyusunan proses bisnis SOP
- Melaksanakan sosialisasi/diskusi pembentukan pokja sebagai implementasi dari Permenko No.1/2025 tentang Mekanisme kerja
- Melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat dalam rangka reuviu atas Laporan Keuangan.
- Menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Direktorat APK Kementerian Keuangan.
- Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2024 kepada Direktorat APK Kementerian Keuangan.
- Melaksanakan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemeriksaan Laporan Keuangan.
- Menyelenggarakan rekonsiliasi eksternal periode Tahun Anggaran 2025 melalui aplikasi MONSAKTI.
- Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya Audited Tahun Anggaran 2024.
- Melaksanakan rekonsiliasi tripartit antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya berupa :

- Melaksanakan rapat koordinasi beberapa unit kerja dalam 1 kesempatan yang sama

- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan atau *workshop*
- Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai (Google Drive)

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada TW selanjutnya

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Masih terdapat keterlambatan dalam proses penyusunan dan penyampaian dokumen akibat koordinasi antar-unit kerja yang belum optimal.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Memperkuat mekanisme koordinasi antar-unit melalui penetapan jadwal kerja yang lebih terstruktur serta penerapan sistem pemantauan capaian secara berkala

5

Sasaran Program 5 : Terselenggaranya Layanan Prima yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5 : Terselenggaranya Layanan Prima yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat

5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat

Latar Belakang

Layanan Sekretariat adalah layanan yang diberikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian kepada Kedeputan untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. **Sekretariat Kemenko Perekonomian juga menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan dalam :**

1. Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perekonomian
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif meliputi ketatausahaan, SDM, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, humas, arsip
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
5. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
6. Pengelolaan data dan informasi
7. Pelaksanaan fungsi lainnya

Indikator kepuasan layanan Sekretariat mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Sekretariat kepada Kedeputan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Kemenko

Perekonomian. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu :

1. Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*);

Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan

2. Aspek Keandalan dalam layanan (*Reability*);

Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan

3. Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*);

Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan

4. Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*);

Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman

5. Aspek Sikap dalam Layanan (*Emphaty*)

Menunjukkan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan

Seluruh aspek kepuasan ini dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

1. Sangat Tidak Puas
2. Tidak Puas
3. Puas
4. Sangat Puas

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2025, Nilai Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat adalah Indeks 3.53 atau Sangat Memuaskan, dengan ringkasan table TW II sebagai berikut

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi Triwulan II	%Kinerja
IKU 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian	Indeks	3 dari 4	3.53	117,66%

Survei Kepuasan Layanan Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian di TW I telah dilaksanakan pada bulan April 2025. Pada triwulan ini, nilai indeks melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 117,66%. Ini merupakan hal yang perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya, sehingga dapat mendukung penilaian indeks di akhir tahun 2025.

Pelaksanaan survei kepuasan layanan Sekretariat dilakukan secara online melalui tautan yang disebarakan kepada seluruh unit kerja. Pelaksanaan survei ini dilaksanakan pertriwulan atau 4 kali setahun. Pengukuran survei bertujuan untuk mengukur realisasi layanan Sekretariat yang diukur melalui 5 (lima) aspek. Adapun aspek-aspek tersebut meliputi :

(1) Ketanggapan pelayanan; (2) Keandalan pelayanan; (3) Sarana dan prasarana fisik; (4) Kepastian pelayanan; dan (5) Sikap dalam pelayanan

Indeks kepuasan layanan Sekretariat diperoleh dari total seluruh layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Layanan Hukum dan Organisasi, Layanan Umum dan Sumber Daya Manusia, dan Layanan Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan, yaitu mengevaluasi tingkat kepuasan dari layanan yang diberikan kepada seluruh unit-unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian dalam mendukung kemajuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan unit kerja sehingga nilai indeks ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas layanan Biro Perencanaan dimasa depan pada area **Responsive, Reability, Tangible, Assurance, dan Emphaty**.

Pelaksanaan survey dilakukan pada link berikut www.bit.ly/LayananSekre2025
Hasil nilai Layanan Sekretariat triwulan I disetiap layanan yang diberikan dapat dilihat pada table berikut :

Indikator	Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Layanan Hukum dan Organisasi	Layanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan	Layanan Umum dan Sumber Daya Manusia	Total
Ketanggapan dalam Pelayanan (<i>Responsiveness</i>)	3.57	3.49	3.51	3.52	3.52
Keandalan dalam Pelayanan (<i>Reability</i>)	3.56	3.54	3.47	3.55	3.54
Sarana dan Prasarana Fisik (<i>Tangible</i>)	3.46	3.43	3.46	3.49	3.46
Kepastian dalam Pelayanan (<i>Assurance</i>)	3.59	3.51	3.53	3.55	3.55
Sikap dalam Pelayanan (<i>Emphaty</i>)	3.63	3.57	3.55	3.57	3.58
Rata-Rata	3.57	3.51	3.50	3.54	3.53

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Biro Sekretariat Kemenko Perekonomian untuk Triwulan I Tahun 2025 mencapai **3,53**, yang termasuk dalam kategori Sangat Puas. Capaian ini melampaui target triwulan yang ditetapkan, yaitu sebesar 3 atau kategori Puas, sehingga menunjukkan kinerja layanan yang melebihi ekspektasi. Layanan yang telah diberikan Sekretariat, meliputi :

Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama :

1. Layanan koordinasi, asistensi, dan konsultasi terkait kinerja
2. Layanan penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi, dan manual iku di lingkup Menteri, Eselon I dan Eselon II
3. Layanan otomatisasi capaian kinerja di lingkungan kemenko ekon
4. Layanan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian Rencana aksi pada tahun berjalan
5. Layanan penganggaran
6. Layanan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan
7. Layanan pemanfaatan media penyimpanan bersama
8. Layanan pemeliharaan seluruh website kantor
9. Layanan koordinasi FGD tata kelola kebijakan
10. Layanan koordinasi penggunaan ruang rapat
11. Layanan perbaikan dan peningkatan pengukuran kinerja yang didasarkan pada Hasil Evaluasi Mandiri serta Rekomendasi Evaluasi AKIP dari Kementerian PAN-RB.;

Layanan Hukum dan Organisasi :

1. Layanan sosialisasi hukum, legal drafting peraturan dan Keputusan, dan dokumentasi produk hukum
2. Layanan analisis hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja
3. Layanan pendampingan dalam rangka advokasi dan sosialisasi layanan instrumen penataan organisasi penataan system kerja melalui nota dinas, diskusi, rapat dan sebagainya
4. Layanan pendampingan penyusunan pokja/tim kerja kepada unit kerja
5. Layanan pendampingan penyusunan rencana aksi dan pemenuhan bukti dukung kepada unit kerja

Layanan Umum dan Sumber Daya Manusia

1. Layanan penyelenggaraan sosialisasi/workshop Bersama unit kerja, diantaranya :
 - a. Sosialisasi peraturan BKN No. 3 Tahun 2023
 - b. Sosialisasi Upaya optimalisasi kinerja perencanaan PBJ Tahun anggaran 2025
 - c. Sosialisasi permenko kehadiran kerja pegawai
 - d. Workshop instrumen audit system kearsipan internal
2. Layanan penghasilan pegawai dan pelaksanaan anggaran belanja pegawai
3. Layanan administrasi kepegawaian yang meliputi : Pengurusan kenaikan Gaji Berkala, Pengelolaan belanja pegawai, Pengurusan administrasi pension PNS, Layanan surat keterangan penghasilan, Fasilitasi cuti pegawai, Presensi online, Penyampaian bukti dukung absen, Konsultasi kepegawaian, pembukaan surat keterangan aktif bekerja, pembuatan ID card, pembuatan surat tugas belajar, penatausahaan penugasan protocol anggota polisi dan TNI, fasilitasi Taspen, Faslitasi BPJS Kesehatan, Fasilitasi jamkesmen dan Jamkestama, Pengurusan administrasi ujian dinas dan ujian penyetaraan kenaikan pangkat
4. Layanan penyelesaian tagihan dan pelaksanaan anggaran, dalam hal penyelesaian permasalahan perbendaharaan dan pertanggungjawaban anggaran
5. Layanan penyusunan atau pembaharuan SOP dan/atau aturan yang jelas terkait prosedur administrasi keuangan
6. Layanan optimalisasi ruang rapat]

Layanan Komunikasi, Layanan informasi dan Persidangan :

1. Layanan pemantauan dan penelaahan berita terkait isu dibidang ekonomi
2. Layanan perumusan dan pelaksanaan manajemen strategi komunikasi di lingkungan Kemenko Perekonomian
3. Layanan pengelolaan publikasi informasi dan kebijakan di bidang ekonomi
4. Layanan pengelolaan liputan dan dokumentasi kegiatan kemenko ekonomi
5. Layanan penerbitan siaran pers, keterangan pers, bantahan.tanggapan, artikel dan surat pembaca
6. Layanan koordinasi penyusunan naskah pimpinan meliputi penyiapan data dukung, penyusunan konsep dan harmonisasi naskah
7. Layanan koordinasi dan fasilitasi persidangan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi yang mencakup penyiapan, pelaksanaan, penataan dan pengolahan digitalisasi dokumen serta pemnyusunan dan distribusi risalah

**Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II, Capaian Program, dan Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop Penguatan Kapasitas SDM	Terlaksana	Telah Melaksanakan Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop Penguatan Kapasitas SDM
2.	Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Layanan pada TW II	Terlaksana	Telah melaksanakan Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Layanan pada TW II
3.	Rekapitulasi Terkait Permohonan Layanan dari Unit Kerja KEdeputian pada TW II	Terlaksana	Telah melaksanakan Rekapitulasi Terkait Permohonan Layanan dari Unit Kerja KEdeputian pada TW II
4.	Tindaklanjut Keluhan Layanan dari Unit Kerja Pada TW II	Terlaksana	Telah Melaksanakan Tindaklanjut Keluhan Layanan dari Unit Kerja Pada TW II

Selain pelaksanaan rencana aksi diatas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Layanan pembuatan akun SAKTI, SIMASPATEN, Digit
- Penyelesaian verifikasi tagihan pertanggungjawaban anggaran melalui aplikasi SIVERA sebanyak 875 SPM
- Terlaksananya urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan yang baik di lingkungan Kemenko Perekonomian yang dilakukan melalui pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan tata usaha pimpinan
- Layanan publikasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui Instagram dan website RB
- Layanan pendampingan terkait pelaksanaan indeks RB kepada unit kerja
- Layanan koordinasi dengan unit kerja terkait tentang instrument penataan organisasi seperti penyesuaian jabatan fungsional di bidang keuangan negara dan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Kesehatan
- Layanan diskusi interaktif terkait pelaksanaan mekanisme kerja dengan unit kerja
- Zoom Meeting mampu mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja di lingkungan Kementerian
- Perhatian pimpinan dan pejabat di lingkungan Kementerian koordinator Bidang Perekonomian yang mendorong terwujudnya layanan
- Ketanggapan dalam pelayanan dan kesesuaian informasi yang diberikan oleh setiap pegawai Biro Perencanaan mampu mendorong peningkatan kepuasan layanan yang diberikan
- Kecepatan dalam memberikan layanan yang dibutuhkan
- Kepastian layanan dalam menyelesaikan kendala/laporan yang diterima oleh unit kerja

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya berupa penghematan anggaran melalui optimalisasi ruang rapat sebagai sarana pendukung agenda RB.

- Penggunaan aplikasi via zoom untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam forum rapat sehingga memberikan ruang kepada seluruh peserta rapat untuk dapat mengikuti acara yang telah direncanakan.
- Penggunaan aplikasi penyimpanan berbasis Cloud, seperti Gdrive
- Penggunaan aplikasi dalam pelaporan dan pengukuran laporan kinerja
- Penggunaan aplikasi dalam menyampaikan kendala/laporan
- Evaluasi berkala yang dilakukan kepada para penyedia layanan kelompok substansi untuk meningkatkan layanan
- Koordinasi antar layanan untuk meningkatkan pemahaman dan keselarasan dalam menyelesaikan laporan

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Masih terdapat unit kerja yang terlambat dalam memberikan laporan kinerja dari waktu yang ditentukan
- Masih banyak pengguna ruang rapat yang tidak melakukan konfirmasi terkait pembatalan – pemesanan ruang rapat
- Masih terdapat arsip dosir pegawai tidak aktif yang perlu segera diserahterimakan kepada pengelola arsip karena sudah lebih dari dua

tahun, namun karena keterbatasan SDM Arsip di kelompok kerja Manajemen SDM maka sangat menyulitkan untuk proses administrasi serah terimanya

- Kurangnya sarana alat komunikasi berupa Handy Talky yang handal bagi personal protocol dan perangkat Menteri yang bertugas yang sesuai dengan kebutuhan di komunikasi lapangan
- Adanya efisiensi dan realokasi anggaran untuk pelatihan teknis yang mendukung pengembangan kompetensi para pegawai di bagian protocol dan tata usaha pimpinan dalam memenuhi 20 jam pelatihan/tahun
- Jumlah staf yang terbatas dibandingkan dengan beban kerja yang tinggi
- Adanya pembaharuan aplikasi pemesanan ruang rapat dari pihak ketiga sehingga proses pemesanan ruang rapat mengalami kendala saat dipesan oleh unit kerja
- Adanya kebijakan efisiensi sehingga pengadaan layanan sarana internal tertunda
- Belum optimalnya perencanaan publikasi konten di instagram dan website RB

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan ini agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Optimalisasi perencanaan publikasi konten di Instagram dan Website RB
- Meminta bantuan tenaga arsiparis dari pengelola arsip Kemenko Ekonomi untuk membantu proses administrasi serat terima dosir pegawai tidak aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Menyampaikan usulan kebutuhan pengadaan HT sesuai spesifikasi yang dibutuhkan di lapangan
- Merumuskan rencana kegiatan pelatihan di bidang layanan keprotokolan dan Tata Usaha Pimpinan
- Menyampaikan usulan kebutuhan jumlah personel pada unit bagian protocol dan tata usaha peimpinan berdasarkan alokasi CPNS 2025
- Melaksanakan proses pemesanan ruang rapat secara manual
- Melaksanakan pengadaan yang sudah terkontrak sebelum kebijakan efisiensi
- Memberikan ketegasan dan sosialisasi berkala agar setiap pihak yang terlibat dapat menyadari sepenuhnya tentang kepatuhan dalam waktu pengumpulan laporan

6

Sasaran Program 6 : Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik

Pencapaian Sasaran Program 6 : Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemenko Perekonomian

1.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemenko Perekonomian

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan persentasi pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Eselon I ini

merupakan agregat dari nilai persentase pelaksanaan RB di level Eselon II, didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum dan Organisasi, dan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, dan Unit Inspektorat.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2025, nilai persentase pelaksanaan RB Sekretariat Kemenko Perekonomian yang telah terealisasi sebesar 50% atau mencapai 100% dari target TW II tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	%Kinerja
IKU 6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	%	50%*	50%*	100%*

***nilai bersifat penilaian mandiri, penilaian akhir dihasilkan diakhir tahun*

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dihitung berdasarkan jumlah agregat dari persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan RB Tematik di level kebiroan dibandingkan dengan jumlah unit Biro yang melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Hingga Triwulan II tahun 2025, aktivitas kegiatan yang dapat mendorong tinggi tercapainya IKU Pelaksanaan RB Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama ini adalah :

- Telah mengajukan rencana aksi RB General di Biro MKKS sebagai tindak lanjut dari rapat finalisasi penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi 2025 di lingkungan Kemenko Perekonomian pada undangan rapat Biro Hukum dan Organisasi dengan No. OT.05/58/SET.M.EKON.2/07/2025
- Telah melaksanakan rapat penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi, dan manual IKU di Biro MKKS dengan melibatkan seluruh kelompok substansi di lingkup Biro MKKS. Kemudian hasil penyusunan tersebut telah disahkan pada acara UND Nomor AK/333/SES.M.EKON/05/2025 pengesahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang dilaksanakan Jumat, 2025 di Gedung Ali Wardhana
- Optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Kemenko Ekon merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola kearsipan elektronik yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Aplikasi ini berfungsi sebagai platform terintegrasi untuk pengelolaan surat menyurat dan arsip dinamis secara digital, mulai dari pencatatan, disposisi, hingga penyimpanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

kearsipan. Selama TW I Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kemenko Perekonomian telah memaksimalkan penggunaan SRIKANDI pada website <https://srikandi.arsip.go.id>



- Rapat koordinasi Tingkat eselon 1 dan Menteri di lingkungan Kemenko Perekonomian, terkait pertumbuhan ekonomi Q2 2025, stimulus dan Quick Win penyerapan belanja untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi 5,2%
- Berdasarkan Nota Dinas Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Nomor KU.04.01/395/SET.M.EKON.4/07/2025 tentang realisasi anggaran Biro Umum dan Sumber Daya Manusia dinyatakan bahwa penyerapan per 30 maret 2025 untuk Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama adalah 20,2%.

Kesimpulan :

Triwulan II tahun 2025, nilai mandiri berdasarkan aktivitas kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama adalah 50%

Hingga Triwulan II tahun 2025, aktivitas kegiatan yang dapat mendongkrak tinggi tercapainya IKU Pelaksanaan RB Biro Hukum dan Organisasi adalah :

- Melaksanakan koordinasi dengan Biro MKKS dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi.
- Melaksanakan koordinasi dengan Biro MKKS dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Hukum dan Organisasi.
- Menyusun matriks peran hasil sebagai bahan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- Melaksanakan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Triwulan I.
- Menyusun laporan Rencana Operasional prioritas nasional terkait rekomendasi Cipta Kerja Triwulan I.
- Menetapkan PIC counterpart dalam rangka pemenuhan kertas kerja SPIP serta melaksanakan reviu bersama seluruh pokja untuk finalisasi kertas kerja SPIP.
- Menyelenggarakan bimbingan teknis aplikasi SRIKANDI secara internal guna meningkatkan pemahaman pegawai terkait penggunaan aplikasi tersebut.
- Melaksanakan koordinasi dengan seluruh ketua Pokja di Biro Hukum dan Organisasi terkait progress realisasi anggaran.
- Memastikan penggunaan logo BerAKHLAK pada bahan paparan maupun bahan publikasi di media sosial

Kesimpulan :

Triwulan II tahun 2025, nilai mandiri berdasarkan aktivitas kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Biro Hukum dan Organisasi adalah 50%

Hingga Triwulan II tahun 2025, aktivitas kegiatan yang dapat mendongkrak tinggi tercapainya IKU Pelaksanaan RB Biro Umum dan SDM adalah :

- Telah dilakukan pemenuhan bukti dukung untuk setiap rencana aksi RB pada triwulan II, yang salah satunya terkompilasi pada narasi kinerja ini. Misalnya, untuk rencana aksi terkait penguatan Indeks Sistem Merit meliputi : (1) Peningkatan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan dan pelatihan, baik secara klasikal, maupun non klasikal yaitu minimal sejumlah 70 ASN sudah terpenuhi; (2) Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan (tugas belajar dan tugas belajar mandiri) yaitu minimal sejumlah 6 ASN sudah terpenuhi
- Tersusunnya kertas kerja penilaian mandiri SPIP pada Biro Umum dan SDM
- Pada triwulan II, telah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II berdasarkan realisasi kinerja yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja Biro Umum dan Sumber Daya Manusia tahun 2025.
- Dilakukan melalui revisi POK Biro Umum dan Sumber Daya Manusia terkait (a) anggaran dalam layanan protokol dan tata usaha pimpinan serta (b) anggaran dalam layanan operasional perkantoran pada periode Mei 2025.
- Telah dilakukan sejumlah upaya dalam mengoptimalkan pemanfaatan SRIKANDI pada lingkup Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, misal dengan melakukan pemberkasan secara berkala untuk naskah aktif di tahun 2025.
- Menyusun dan menyampaikan realisasi anggaran setiap bulan kepada unit kerja
- Melakukan penyusunan dan pemutakhiran RPD melalui mekanisme revisi anggaran kepada Kementerian Keuangan
- Telah dilakukan Rapat Internal Biro Umum dan SDM (22 April 2025) untuk membahas hasil kinerja triwulan I dan rencana kerja untuk triwulan II tahun 2025
- Biro Umum dan Sumber Daya Manusia telah menyampaikan responden dalam pengisian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), baik dari pihak internal maupun eksternal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Sudah dilakukan misalnya dengan menampilkan Logo Berakhlak pada sejumlah bahan paparan, baik pada saat rapat/sosialisasi/workshop internal dan eksternal.

Kesimpulan :

Triwulan II tahun 2025, nilai mandiri berdasarkan aktivitas kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Biro Umum dan SDM adalah 50%

Hingga Triwulan I tahun 2025, aktivitas kegiatan yang dapat mendongkrak tinggi tercapainya IKU Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Persidangan adalah :

- Pemenuhan Bukti Dukung Rencana Aksi RB Triwulan I telah terlaksana. Bukti dukung untuk setiap rencana aksi RB pada triwulan I telah dipenuhi, dan salah satunya sudah terkompilasi dalam narasi kinerja

- Penyusunan RPD Triwulan I telah terlaksana. Penyusunan HOK (Hari Orang Kerja) telah dilakukan berdasarkan data perencanaan program dan anggaran dari unit Eselon II.

Kesimpulan :

Triwulan II tahun 2025, nilai mandiri berdasarkan aktivitas kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Biro KLIP adalah 50%

Hingga Triwulan I tahun 2025, aktivitas kegiatan yang dapat mendongkrak tinggi tercapainya IKU Pelaksanaan Reformasi Inspektorat Kemenko Ekon adalah :

- Pelaksanaan rapat penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan IV TA 2024
- Penyusunan LHEI RB Triwulan IV TA 2024
- Pelaksanaan rapat evaluasi hasil sementara RB tahun 2024 dan pendalaman bukti dukung sanggah evaluasi RB
- Pelaksanaan rapat pembahasan target capaian RB General tahun 2025

Kesimpulan :

Triwulan II tahun 2025, nilai mandiri berdasarkan aktivitas kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Inspektorat adalah 50%

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dihitung berdasarkan jumlah agregat dari persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan RB Tematik di level eselon II dibandingkan dengan jumlah unit Eselon II di lingkungan Sekretariat yang melaksanakan seluruh rencana aksi. Nilai akhir penjumlahan dari IKU ini adalah 50%

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan II	Terlaksana	Terlaksananya dokumen penyusunan laporan Kinerja TW II
2.	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW II	Terlaksana	Telah teroptimalisasinya pemanfaatan SRIKANDI TW II

Selain pelaksanaan rencana aksi diatas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang lancar dan feedback yang baik antara Sekretariat dengan unit-unit kerja di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian
- Pelaksanaan penyusunan matriks tindaklanjut atas penyusunan indikator kinerja tahun 2025
- Rutin melaksanakan monitoring atas pencapaian IKU Pelaksanaan RB di lingkungan Biro Manajemen Kinerja, Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan, Biro Hukum dan Organisasi, dan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia agar dapat memastikan bahwa target telah tercapai sesuai dengan rencana aksi yang sudah dibuat dan telah melibatkan semua pegawai di unit kerja
- Melaksanakan pembahasan terkait penetapan target-target indicator kinerja
- Melakukan koordinasi revisi anggaran dengan seluruh pokja
- Menyusun alur mekanisme kerja di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi untuk menetapkan PIC dalam dukungan teknis dan administrative

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya

- Melaksanakan digitalisasi dalam pengolahan akses dan data
- Menggunakan penyimpanan berbasis CLOUD
- Koordinasi menggunakan fasilitas *Zoom Meeting*
- Melaksanakan pelatihan atau *Coaching clinic* dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan pegawai
- Meningkatkan koordinasi antar unit kerja
- Melaksanakan 2 kegiatan dalam satu waktu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga saat ini masih belum ditemukan kendala atas capaian target yang akan di capai

Jakarta, Juli 2025
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Susiwijono